

MENJADI SEPTEMBER-OKTOBER 2021

## Pelaksanaan Asesmen Nasional Diundur

**JAKARTA (KR)** - Pelaksanaan tes Asesmen Nasional (AN) pengganti Ujian Nasional (UN) untuk siswa kelas 11, 8 dan 5 diundur menjadi September-Oktober 2021. Semula direncanakan Maret-Agustus 2021, namun karena kondisi Covid-19 relatif meningkat, sehingga pelaksanaan AN diundur.

Hal tersebut disampaikan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi X DPR RI, Rabu (20/1). Mendikbud Nadiem hadir secara virtual. "Karena ada situasi pandemi yang relatif meningkat, Kemendikbud memutuskan untuk menunda pelaksanaan asesmen nasional dan target jadwal baru yaitu September dan Oktober 2021," jelas Mendikbud.

Nadiem mengatakan, penundaan ini sekaligus untuk mempersiapkan pelaksanaan AN, sehingga

berjalan optimal. Selain itu, juga untuk menyesuaikan aturan protokol kesehatan. Berbagai persiapan, baik prokes logistik dan infrastruktur diharapkan bisa lebih optimal.

AN ini ujar Nadiem, akan dilakukan pusat pembelajaran yang di dalamnya berisi pakar dan akademisi, baik dari nasional dan internasional. Secara logistik, Nadiem menyebut hampir sama dengan pelaksanaan Ujian Nasional. "Pengembangan AN ini dilaksanakan pusat asesmen dan pem-

belajaran dan yang punya pengalaman dalam mengelola asesmen standar berskala nasional, secara logistik hampir sama seperti UN dan pengembangan teknis AN ini dilakukan berbagai macam pakar nasional dan internasional dengan latar belakang peneliti dan akademisi," katanya.

Nadiem mengatakan, pelaksanaan AN di tahun 2021 ini sekaligus melakukan pemetaan daerah yang tertinggal, sehingga bantuan dapat diberikan untuk perbaikan di tahun depan. "Kalau kita *nggak* laksanakan asesmen tahun ini artinya kita tidak bisa mengetahui mana sekolah dan daerah yang paling tertinggal. Kalau kita tidak bisa mengetahui mana sekolah dan daerah yang tertinggal kita tidak bisa membuat strategi pengembangan strategi

bantuan untuk sekolah yang paling membutuhkan bantuan kita," paparnya.

Demikian alasan terpenting harus ada baseline terhadap AN di tahun 2021 dan bisa dilihat perbandingannya di tahun 2022. "Paling tidak concern utama Kemendikbud adalah untuk mengetahui mana sekolah dan daerah yang paling butuh bantuan dari pemda dan pemerintah pusat," lanjut Nadiem.

AN adalah sistem penilaian baru yang akan diterapkan di sekolah. Sistem ini berbeda dengan UN yang digunakan pemerintah sebelumnya untuk menilai pendidikan. Untuk siswa kelas 12 SMA/SMK, Nadiem menegaskan, untuk berkonsentrasi pada ujian sekolah dan persiapan masuk perguruan tinggi. (Ari)



KR-Riyadi

Anak-anak sedang membaca buku di TBM Kebun Ilmu Tegal.

### TBM 'KEBUN ILMU' SEDIKAN HADIAH Anak-Anak Semangat Membaca Buku

**TEGAL (KR)** - Melihat kondisi anak yang banyak waktu luang akibat pandemi Covid-19, pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 'Kebun Ilmu' Kraton Tegal, berupaya menumbuhkan minat baca. Salah satunya dengan cara menyediakan hadiah menarik bagi anak yang rajin berkunjung dan membaca buku bacaan di TBM tersebut.

Sekretaris Relawan Pendidikan Kota Tegal, Sri Handayani mengatakan, untuk menggairahkan minat baca anak-anak di musim Korona ini, pihaknya membuka TBM dari pukul 07.00 hingga 17.00. "Khusus hari Minggu pagi, kami undang anak-anak dan remaja untuk datang ke TBM dan dianjurkan membaca buku, orangtua juga diperbolehkan mendampingi anaknya saat berkunjung ke TBM," ujar Sri.

Ia menambahkan, guna merangsang anak tekun membaca, pihaknya menyediakan hadiah menarik yang akan diberikan kepada tiga anak yang rajin membaca buku di TBM Kebun Ilmu.

"Cara menilainya dari daftar kunjungan anak dan lamanya anak membaca buku, tiap bulan data itu dinilai dan tiga anak yang rajin membaca dapat hadiah," kata Sri, seraya menyebutkan, cara itu dapat meningkatkan anak membaca buku.

Jenis buku yang tersedia adalah buku agama, Ilmu pengetahuan fauna dan flora serta buku iptek. "TBM Kebun Ilmu ini merupakan cabang dari kegiatan Relawan Pendidikan. Serial yang berkunjung ke TBM harus mematuhi protokol kesehatan dan harapannya selain dapat Ilmu juga kesehatan terjaga," tegas Sri. (Ryd)

### BPP Bangun Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial

**JAKARTA (KR)** - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) membangun dan meluncurkan Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial (PIKA) sebagai wadah akselerasi pemanfaatan kecerdasan artifisial di Indonesia. "Untuk mendorong penerapan kecerdasan artifisial yang selaras dengan kepentingan nasional, BPPT mempersiapkan infrastruktur serta ekosistem untuk mengorkestrasi riset dan inovasi yang berkelanjutan dalam sebuah wadah, yaitu Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial (PIKA)," kata Kepala BPPT Hammam Riza dalam konferensi pers Outlook BPPT 2021 dan Capaian BPPT 2020, Kamis (21/1).

PIKA merupakan wadah bagi semua unsur quad helix yaitu pemerintah, industri, akademisi dan komunitas dalam berkolaborasi pada riset dan inovasi kecerdasan artifisial dengan memaksimalkan seluruh sumber daya riset dan inovasi nasional. Hammam menuturkan, PIKA bersifat terbuka, partisipatif, berbasis nilai (*value-based synergy*), *demand-driven*, mandiri serta memiliki tata kelola yang adaptif dan lincah.

Dalam mendukung pengembangan kegiatan kecerdasan artifisial di Indonesia,

PIKA telah dilengkapi dengan NVIDIA DGXA A100, sebagai super komputer. "BPPT telah menghadirkan super komputer dalam upaya penguatan infrastruktur untuk kecerdasan artifisial dengan melaksanakan instalasi NVIDIA DGXA A100 yang merupakan serangkaian GPU yang digunakan untuk komputasi dalam *machine learning* dan *deep learning* serta algoritma lainnya yang digunakan di dalam kecerdasan artifisial," tutur Hammam.

Hammam mengatakan, Indonesia memiliki beberapa tantangan untuk mengembangkan kecerdasan buatan di antaranya kesiapan regulasi yang mengatur etika penggunaan, kesiapan tenaga kerja, kesiapan infrastruktur dan data pendukung pemodelan serta kesiapan industri dan sektor publik dalam mengadopsi inovasi kecerdasan artifisial. Oleh karena itu, PIKA yang diinisiasi BPPT tersebut diharapkan bisa menjadi wadah dalam mengakselerasi pemanfaatan kecerdasan artifisial di Indonesia serta memberikan manfaatnya bagi masyarakat luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan bangsa. (Ant)

### KEMENSOS GANDENG PERGURUAN TINGGI Susun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

**JAKARTA (KR)** - Kementerian Sosial (Kemensos) sedang menyusun parameter yang tepat untuk memastikan penerima manfaat menerima bantuan sesuai dengan kebutuhan. Nantinya, parameter ini digunakan pemerintah kabupaten dan kota untuk menentukan data kemiskinan sebelum dikirimkan ke Kemensos.

Untuk keperluan itu, Kemensos bekerja bersama unsur perguruan tinggi (PT). Nantinya akan ada parameter baru yang berbeda-beda. Selain itu, proses pemutakhiran juga melibatkan pemerintah provinsi.

"Jadi kalau paramaterya sama, misalnya pakaian, bagaimana dengan warga kita yang berada di gunung? Sebenarnya saya berharap parameter ini sudah selesai akhir Januari, sehingga awal Februari bisa dilakukan updating data dari daerah dengan parameter baru, sehingga data lebih sempurna," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam acara Rapat Koordinasi Program Penanganan Fakir Miskin di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (21/1).

Risma menyatakan, ia tidak akan melakukan proses pembaruan data dengan prinsip-prinsip statistik. "Kami akan menggunakan data dari daerah, yang akan direkap provinsi. Kemudian dikirim ke kami. Nantinya PT akan melakukan verifikasi, *quality assurance* terhadap data tersebut. Jadi saya tidak akan melakukan pendataan statistik," kata Risma. (Ari)

## EKONOMI

### BI Pertahankan Suku Bunga 3,75 %

**JAKARTA (KR)** - Bank Indonesia (BI) mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,75 persen. Begitu juga suku bunga Deposit Facility sebesar 3,00 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,50 persen.

Keputusan diambil dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi. "BI memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional, melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo pada konferensi pers secara virtual di Jakarta, Kamis (21/1).

Dikatakan, di samping kebijakan tersebut, Bank Indonesia menempuh pula langkah-langkah antara lain, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. "Ke depan, Bank Indonesia terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan. Koordinasi kaaebijakan yang erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional," kata Perry. (Lmg)

### Ekonomi Hijau dan Digital Jadi Tren

**JAKARTA (KR)** - Ekonomi hijau dan ekonomi digital merupakan dua tren ekonomi yang tengah berkembang secara global, utamanya di negara-negara maju. Dua hal ini harus dapat diikuti dalam jangka panjang oleh Indonesia untuk dapat menyelaraskan perekonomiannya dengan perkembangan global.

"Dalam jangka panjang, kita memiliki kekuatan di *green product* dan *green economy* yang saya kira sekarang ini semua negara kawasan mulai melihat itu," kata Presiden di Istana Negara Jakarta, Kamis (21/1).

Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup menjadikan produk dan ekonomi hijau terus berkembang. Pada tahap selanjutnya, hal tersebut diyakini akan turut memengaruhi ekonomi dan bisnis global, yang tentunya juga akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

"Ini yang akan berkembang. Kita memiliki kesempatan yang besar masuk ke produk hijau dan ekonomi hijau ini baik dari sisi produksi, distribusi, dan konsumsi," kata Presiden.

Selain ekonomi hijau, Presiden juga melihat bahwa di masa saat ini, semua sektor mau tidak mau harus masuk kepada tahapan digitalisasi. (Sim)

## Harga Tanah Mahal, Sulit Sediakan Rumah Murah

**YOGYA (KR)** - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY berupaya mengupayakan menyediakan Bank Tanah atau *Land Banking* secara bertahap apabila Peraturan pemerintah (PP) terkait Bank Tanah yang merupakan turunan dari Undang Undang (UU) Cipta Kerja telah ditetapkan. Kehadiran Bank Tanah ini diharapkan mampu menekan tingginya angka kekurangan rumah atau *backlog* sebesar 250.000 unit yang disebabkan mahalnya harga tanah di DIY.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Beny Suharsono mengatakan, Pemda telah berupaya menyediakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2P) di DIY sesuai arahan dari pemerintah saat ini. Namun, jika Pemda harus menyediakan Bank Tanah, akan mengupayakan apabila sudah ada paung hukum berupa PP.

"Beberapa aktivitas, pembatasan zonasi sudah ada di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota masing-masing. Sampai kesana, apakah kemam-

puan kita menyediakan Bank Tanah bisa dilakukan? Pada sisi lain, kita sudah beli beberapa aset sebenarnya tetapi tidak utuh tanah yang luas karena kapasitas tanah yang luas di lapangan," tutur Beny di Kompleks Kepatihan, Kamis (21/1).

Beny mengungkapkan, harga tanah di DIY memang sudah mahal sekali sehingga wajar apabila para pengembang di DIY sulit untuk menyediakan rumah murah atau rumah bersubsidi guna membantu menekan kekurangan rumah yang masih tinggi di DIY.

Dalam hal ini, Pemda DIY pun sudah proyek mengajukan usulan kepada pemerintah pusat untuk penyediaan rumah pekerja atau rumah bersubsidi tersebut alias pemenuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di DIY. "Jika memang PP Bank Tanah sudah turun, harus

diinisiasi Pemda akan berupaya secara bertahap sesuai kemampuan menyediakan Bank Tanah di DIY. Kami juga telah melakukan diskusi lokasi yang memungkinkan untuk Bank Tanah. Contohnya di Sleman masih memungkinkan, namun zonasinya tidak boleh untuk perumahan karena

diperuntukkan sebagai penyangga pertanian," tandasnya.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY tersebut menjelaskan, lokasi yang memungkinkan untuk Bank Tanah di DIY adalah sisi Timur seperti Gunungkidul. (Ira)

## Info Bank Jateng

### BANK JATENG MEMASUKI 2021: MEMBANGUN SINERGI Unggul Pelayanan Berbasis Teknologi IT

DUNIA baru bagi Bank Jateng adalah realitas masa kini yang ditandai pesatnya penggunaan teknologi dan digitalisasi. Bank Jateng yang sudah terdapat dalam kreasi dan terobos berbasis teknologi digital, bertekad meningkatkan pelayanan di masa mendatang. Obsesinya, menjadikan Layanan Teknologi IT sebagai keunggulan pelayanan yang dimiliki.

Seiring pengembangan layanan berbasis digitalisasi, Bank Jateng berharap nasabah semakin memanfaatkan sebaik-baiknya layanan-aplikasi seperti mobile banking dan layanan-channel yang telah disediakan. Untuk itu, Bank Jateng terus mengoptimalkan Tim Pegawai unit Teknologi Sistem Informasi sebagai tulang punggung untuk mengakselerasi inovasi dengan totalitas.

Di tengah kepercayaan masyarakat yang semakin meluas, Bank Jateng telah memaksimalkan layanannya lewat transaksi nontunai di pasar-pasar tradisional di Jateng. Program ini ditargetkan mampu menjangkau seluruh pasar tradisional dan dapat mendukung program pembayaran non tunai. program ini untuk mendukung pencairan adaptasi kebiasaan baru di tengah masyarakat oleh pemerintah guna mengurangi risiko penyebaran pandemi Covid-19.

Layanan nontunai Bank Jateng meliputi layanan pembayaran restribusi pasar yang dipungut pemerintah daerah dari para pedagang dalam bentuk penggunaan Kartu e-Retribusi, serta layanan transaksi pedagang dan pembeli dengan menggunakan aplikasi pembayaran non tunai berbasis QR Code Indonesia Standard (QRIS) sehingga persinggungan antara pembayar dan penerima pembayaran bisa diminimalisasikan.

Kartu E-Retribusi yang diterbitkan Bank Jateng kini menjadi sistem pembayaran resmi di beberapa pasar tradisional, dan penerapannya cukup sederhana, yakni dengan ditempel pada



Dr Supriyatno MBA

MPos (alat payment) yang dibawa petugas penagihan restribusi pasar. Dengan pola itu, pembayaran dan pencatatannya dapat berlangsung secara real time. Untuk menambah isi saldo kartu atau top up dapat dilakukan di kantor layanan Bank Jateng dan kartu EDC (Electronic Data Capture).

Bank Jateng dan Pemkab Sragen dengan membuat E-Ticketing yang merupakan perpaduan nontunai dengan pembayaran tunai. Pedagang yang saldo E-Retribusinya tidak mencukupi bisa membayar tunai ke petugas, dan petugas langsung membayarkan kartu E-Ticketing yang ada, sehingga proses dan pencatatannya tetap real time. E-Retribusi di pasar tradisional sesuai konsep Bank Jateng, diyakini mengaktifkan metode pencatatan pendapatan daerah, meningkatkan transaksi nontunai, meningkatkan pendapatan dana murah, meningkatkan layanan, serta mengurangi beban kerja dari teller dan ATM.

Bupati Tegal Umi Azizah, saat meluncurkan e-retribusi di Pasar Pepadon Kecamatan Dukuhuri Kabupaten Tegal beberapa waktu lalu, berharap penerapan metode pembayaran memudahkan pedagang dan pada akhirnya mengurangi kebocoran kemungkinan oleh oknum. Diharapkan 26 pasar tradisional di wilayahnya bisa menerapkan sistem pembayaran nontunai yang dikelola Bank Jateng.

Penerapan aplikasi nontunai antara pedagang dan pembeli, dimulai dengan proyek percontohan di Pasar Gawok Kecamatan Gatak Sukoharjo sejak 2019. Penerapan aplikasi pembayaran nontunai QRIS ini terkoneksi dengan aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik dan mobile banking yang didukung Bank Indonesia. (Disampaikan Direktur Utama Bank Jateng Dr Supriyatno MBA kepada Wartawan KR Isdiyanto)

